

# Evaluasi Penyelenggaraan MTs-SA (Satu Atap)

Evi Sopandi

## **Abstract**

*The Ministry of Religious Affairs cooperates with the Government of Australia had built an Islamic Junior High School-One Ceiling Program (MTs-SA) amid the rural community in suburb area. The development of the MTs-SA aims at improving primary education access in the course of supporting an accomplishment for obligatory study and of improving graduation quality at private education institution managed by community group as classified poor or geographically isolated. This writing explains the educational access development, management, and community participation in supporting the existence of MTs SA.*

**Keywords:** *MTs SA, primary educational access, community participation*

## **Abstrak**

Kementerian Agama bekerja sama dengan Pemerintah Australia telah

Drs. Evi Sopandi, M.Pd  
adalah peneliti Puslitbang  
Pendidikan Agama dan  
Keagamaan – Badan  
Litbang dan Diklat  
Kementerian Agama RI

\*\*\*\*\*

Naskah diterima 15 Mei  
2011. Revisi pertama, 30  
Mei 2011, revisi  
kedua, 15 Juni 2011 dan  
revisi terakhir 25 Juli  
2011.

membangun Madrasah Tsanawiyah SA (MTs-SA) di tengah masyarakat pedesaan di wilayah pinggiran. Pembangunan MTs-SA bertujuan untuk meningkatkan akses pendidikan dasar dalam rangka mendukung penyelesaian wajib belajar, serta peningkatan kualitas lulusan pada lembaga pendidikan swasta yang dikelola oleh kelompok masyarakat yang tergolong miskin atau secara terisolasi secara geografis. Tulisan ini menjelaskan pengembangan akses pendidikan, tata kelola, dan partisipasi masyarakat dalam mendukung keberadaan MTs SA.

**Kata Kunci:** akses pendidikan dasar, MTs SA, partisipasi masyarakat

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pendidikan merupakan tanggungjawab negara kepada setiap warga sebagaimana termaktub dalam konstitusi. Semua warga negara berhak terhadap akses pendidikan di mana pun dan dalam komunitas apapun. Namun demikian, pada umumnya masyarakat tertentu sulit mendapatkan akses terhadap pendidikan. Sulitnya mendapatkan akses disebabkan oleh letak geografi yang begitu jauh dari pusat pembangunan atau terisolir dari masyarakat luar atau secara budaya, mereka sulit menerima pendidikan formal yang biasa diakses oleh masyarakat. Demikian juga secara ekonomi, karena mereka tidak mampu membiayai pendidikan akibat mahalnya biaya pendidikan.

Untuk itu dalam rangka memberikan layanan pendidikan bagi masyarakat baik pedalaman maupun karena terisolir dan sulit terjangkau, pemerintah khususnya Kementerian Agama telah bekerjasama dengan pemerintah Australia, melaksanakan pembangunan Madrasah Tsanawiyah SA (MTs-SA). Program pembangunan MTs-SA merupakan bagian dari program pemerintah dalam meningkatkan akses pendidikan dasar untuk mendukung penuntasan wajib belajar, peningkatan mutu lulusan, melalui peningkatan peran serta masyarakat dan pemberdayaan institusi

pendidikan terutama yang dikelola oleh swasta yang banyak melayani golongan masyarakat ekonomi kurang mampu.

Dalam rangka pendidikan SA ini Kementerian Agama telah membangun Madrasah Tsanawiyah (MTs-SA) di berbagai wilayah secara terpadu dengan madrasah Ibtidaiyah atau satuan pendidikan dasar formal sederajat lainnya yang berlokasi di pesantren dan membangun Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) secara terpadu dengan Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) di bawah naungan Kementerian Agama.

Pada tahun 2006 awalnya diarahkan untuk membangun MTs terpadu dengan MI, madrasah diniyah, dan madrasah salafiyah pada sejumlah pesantren dalam bentuk Madrasah Tsanawiyah Pesantren SA (MTs-PSA). Pada tahun 2007 terjadi perubahan kriteria. Pemilihan lokasi hanya diperuntukkan bagi pondok pesantren yang memiliki MI atau sederajat sehingga terjadi perubahan nama, yaitu Madrasah Tsanawiyah SA (MTs-SA).

Mulai tahun 2006 hingga tahun 2009 telah selesai dibangun sebanyak 500 MTS-SA. Dengan selesainya pembangunan 500 MTS-SA tersebut diharapkan pada tahun 2009 ditargetkan anak usia 13 sampai 15 tahun yang bisa tertampung di SMP dan MTs mencapai 95 persen. Artinya, 95 persen anak usia MTs dan SMP bisa tertampung di sekolah SMP atau MTs. Sebanyak 95 persen itu merupakan angka partisipasi kasar (APK). Program ini merupakan program strategis yang harus didukung oleh semua pihak. Namun kendala-kendala teknis penyelenggaraan MTS-SA sudah nampak mulai dari pemilihan lokasi hingga pemenuhan persyaratan yang belum konsisten dengan pedoman. Oleh karena itu sebelum program ini tuntas dilaksanakan perlu dilakukan evaluasi .

## **B. Permasalahan Penelitian**

Rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian adalah sebagai berikut.

1. Bagaimanakah pengembangan akses pendidikan pada MTs SA?
2. Bagaimanakah tata kelola yang berlangsung di MTs SA?

3. Bagaimanakah tingkat partisipasi masyarakat dalam mendukung keberadaan MTs SA?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Pengembangan akses pendidikan pada MTs SA.
2. Tata kelola yang berlangsung di MTs SA.
3. Tingkat partisipasi masyarakat dalam mendukung keberadaan MTs SA.

### **D. Ruang Lingkup Penelitian**

Batasan cakupan penelitian adalah pada 3 aspek, yaitu: 1) pengembangan akses pendidikan pada MTs SA, yang mencakup ketersediaan layanan, keterjangkauan layanan, dan perkembangan peserta didik; 2) tata kelola MTs SA, yang mencakup aspek kepemimpinan, kemandirian, dan transparansi; 3) tingkat partisipasi masyarakat, yang terdiri dari masyarakat umum, komite sekolah, dan lembaga-lembaga terkait.

## **II. KERANGKA TEORI**

### **A. Pengertian Evaluasi**

Ada berbagai pendapat mengenai pengertian evaluasi yang dikemukakan oleh para pakar ataupun lembaga evaluasi, antara lain dari Popham yang menyatakan bahwa evaluasi adalah proses pencarian, pengumpulan dan pengambilan data (informasi) yang diperlukan untuk memberikan pertimbangan apakah program yang sedang berjalan perlu diperbaiki, dihentikan atau diteruskan.<sup>1</sup> Evaluasi merupakan suatu proses sistematis dalam mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan informasi untuk

---

<sup>1</sup> W. James Popham, 1981, *Modern Educational Evaluation*, New Jersey: Prentice Hall Inc., h. 7.

mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan program dengan kriteria tertentu untuk keperluan pembuatan keputusan.<sup>2</sup>

Evaluasi bertujuan untuk mengetahui apakah program (sekolah atau lembaga) mencapai sasaran yang diharapkan. Evaluasi menekankan pada aspek hasil (*output*). Konsekuensinya, evaluasi baru dapat dilakukan jika suatu program sudah berjalan dalam satu periode, sesuai dengan tahapan sasaran yang dirancang. Misalnya untuk satu tahun pelajaran, satu catur wulan atau satu semester. Sejalan dengan pengertian dan tujuan evaluasi yang dikemukakan diatas, Groundlund menyatakan bahwa evaluasi adalah proses untuk mengumpulkan informasi secara sistematis, obyektif, dan terstruktur untuk memberikan keputusan terhadap sesuatu obyek.<sup>3</sup> Pendapat tersebut selanjutnya dipertegas oleh Djaali dkk, yang mengatakan bahwa evaluasi adalah proses menilai sesuatu berdasarkan kriteria atau tujuan yang telah ditetapkan, yang selanjutnya diikuti dengan pengambilan keputusan atas obyek yang dievaluasi.<sup>4</sup>

Evaluasi adalah suatu proses yang sistematis untuk melakukan pengumpulan, analisis dan interpretasi terhadap informasi yang dapat menetapkan tingkatan pencapaian tujuan belajar dari pembelajar. Evaluasi dilaksanakan untuk dapat menyelesaikan suatu masalah, meningkatkan kualitas program, penentuan terhadap status program, menilai kegunaan kemanfaatan program.

Dari pernyataan dan berbagai definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa evaluasi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh data/informasi secara kualitatif dan kuantitatif, sehingga dapat diperoleh suatu keputusan. Informasi tersebut digunakan untuk menilai seberapa jauh program telah

---

<sup>2</sup> Depdiknas. 2002. *Panduan Monitoring dan Evaluasi*; Buku 3, Jakarta: Depdiknas Dikdasmen Direktorat SLTP, h. 2.

<sup>3</sup> Norman E. Grounlund and Robert L. Linn. 1990. *Measurment and Evaluation in Teaching*, New York: Mac Milan Publishing Company, h. 5.

<sup>4</sup> Djaali, dkk. 2004. *Pengukuran Dalam Bidang Pendidikan*, Jakarta: PPs UNJ, h. 1.

berjalan sesuai dengan yang direncanakan dengan jalan membandingkan beberapa kriteria yang telah ada sebelumnya.

## **B. Pengertian Evaluasi Program**

Menurut Rutman, evaluasi program adalah penerapan metode-metode ilmiah untuk mengukur implementasi dan hasil program guna pengambilan keputusan.<sup>5</sup> Sedangkan Musa menjelaskan bahwa evaluasi program adalah suatu kegiatan untuk memperoleh gambaran tentang keadaan suatu objek secara terencana, sistematis dengan arah dan tujuan yang jelas.<sup>6</sup> Brinkerhoff, mengemukakan pendapatnya tentang evaluasi program, yaitu: (1) Proses penentuan sejauh mana tujuan dan sasaran program telah terealisasi, (2) Memberikan informasi dalam pengambilan keputusan, (3) Perbandingan kinerja dengan patokan-patokan tertentu untuk melihat apakah terdapat kesenjangan, (4) Penilaian tentang harga dan kualitas, (5) Ukuran, pilihan dan perkembangannya sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan; (6) Investigasi sistematis mengenai nilai atau kualitas suatu objek.<sup>7</sup>

Dalam melakukan evaluasi program tidak bisa dilakukan secara serampangan, tetapi sistematis, rinci, dan menggunakan prosedur yang sudah diuji secara cermat. Dengan metode-metode tertentu maka akan diperoleh data yang handal dan dapat dipercaya. Penentuan kebijaksanaan akan tepat apabila data yang digunakan sebagai pertimbangan benar, akurat, dan lengkap, karena evaluasi dapat menentukan ketercapaian sebuah program. Menurut Rutman, evaluasi program adalah penerapan metode-metode ilmiah untuk mengukur implementasi dan hasil program

---

<sup>5</sup> Leonard Rutman. 1984. *Evaluation Research Methodology* (New Delhi: Sege Publication India PVT. Ltd., 2 ed, h. 122.

<sup>6</sup> Saburi Musa. 2005. *Evaluasi Program Pembelajaran dan Pemberdayaan Masyarakat*, Bandung: Y-Pin Indonesia, h. 8.

<sup>7</sup> Robert O. Brinkerhoff, et. all., 1983, *Program Evaluation, A Practitioner's Guide For Trainers and Educators* , Boston: Kluwer-Nijhoff Publishing, h. 11

untuk pengambilan keputusan. Sedangkan Bigman berpendapat bahwa ada beberapa pemakaian evaluasi program, yaitu:<sup>8</sup> (1) Untuk menemukan apakah tujuan dapat dicapai, dan seberapa jauh dapat dicapai, (2) Untuk menemukan prinsip yang melandasi keberhasilan program, (3) Untuk melakukan eksperimen-eksperimen dengan teknik-teknik tertentu guna meningkatkan efektifitas, (4) Untuk meletakkan dasar guna melakukan penelitian lanjut atas dasar keberhasilan alternatif teknik yang digunakan. (5) Untuk merumuskan kembali cara yang akan digunakan dalam mencapai tujuan, dan bahkan merumuskan kembali sub tujuan sesuai dengan temuan penelitian.

Dari berbagai pendapat dan pengertian evaluasi program di atas, dapat disimpulkan bahwa evaluasi program adalah suatu upaya untuk mengumpulkan, menyusun, mengolah dan menganalisa fakta, data dan informasi untuk menyimpulkan harga, nilai, prestasi, kegunaan, manfaat mengenai sesuatu program, kantor, sekolah, organisasi atau lembaga dan lain-lain untuk dibuat kesimpulan sebagai landasan pengambilan keputusan tentang program tersebut, apakah dilanjutkan, direvisi atau dihentikan.

### **III. METODOLOGI**

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian evaluasi dengan pendekatan kualitatif. Namun demikian, penelitian ini tidak mengenyampingkan fenomena atau data yang bersifat kuantitatif. Masing-masing data (kualitatif dan kuantitatif) nantinya akan dianalisis secara proporsional, sehingga gambaran tentang fenomena di lapangan dapat terungkap secara lebih baik.

#### **B. Variabel Penelitian dan Definsi Operasional**

Variabel yang diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut; 1) Pengembangan akses pendidikan mencakup: keberhasilan MTs-SA dalam penyediaan layanan pendidikan, keter-

---

<sup>8</sup> Rutman, *Op.cit*, h. 123

jangkauan layanan, dan respon masyarakat; 2) Tata kelola mencakup: gambaran obyektif tentang kepemimpinan, kemandirian, dan transparansi yang terdapat di MTs-SA; dan 3) Partisipasi masyarakat terkait dengan tingkat keikutsertaan komponen masyarakat dalam mendukung program pendidikan pada MTs-SA.

### C. Tempat dan Waktu Penelitian

Penetapan MTs SA yang menjadi sasaran penelitian ditentukan secara purposif, yaitu sesuai dengan tujuan peneliti. Dalam hal ini, MTs SA yang dipilih adalah yang sudah memiliki kelas 2, atau telah berjalan lebih dari 1 tahun. Empat (4) propinsi yang dipilih adalah Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

Tabel. 1: Distribusi Lokasi Penelitian MTs.-PSA

No	Propinsi	Kab/Kota	Nama MTs. SA
1	Banten	Tangerang	MTs-SA Ponpes Salafiyah Nurul Huda
		Serang	MTs-SA Hidayatul Athfal
		Pandeglang	MTs-SA Miftahul Ulum
		Lebak	MTs-SA Darul Muhsinin
2	Jabar	Bekasi	MTs-SA Nurul Huda
		Tasikmalaya	MTs-SA Pesantren Daar El Fikri
		Garut	MTs-SA Nurul Falah
		Sukabumi	MTs-SA Raudhatushibyan
3	Jatim	Pasuruan	MTs-SA Roudlotul Karomah
		Pamekasan	MTs-SA Sabilul Muttaqien
		Sampang	MTs-SA Ponpes Miftahul Ulum I
		Malang	MTs-SA Kota Malang
4	Jateng	Purwodadi	MTs-SA Al-Hidayah
		Brebes	MTs Rungkat Losari
		Sukoharjo	MTs-SA Al-Islam
		Kebumen	MTs-SA Al-Ihsan

### D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, angket, observasi non partisipan, dan dokumentasi. Dari keempat teknik

tersebut diperoleh data primer dan data skunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari informan dan melalui observasi. Sedangkan data skunder diperoleh melalui dokumentasi baik dari sasaran penelitian maupun dari orang yang mengetahui tentang penyelenggaraan MTs- SA.

### E. Analisis Data

Analisa data dilakukan dengan cara mendalami dan menginterpretasikan fenomena yang terjadi di lapangan yang bisa dicatat dan bersumber dari tindakan serta perkataan dari obyek penelitian. Sedangkan langkah yang ditempuh adalah dengan mengorganisasi data lapangan, baik yang bersumber dari data sekunder (daftar isian), data primer (hasil wawancara dan observasi) dan dokumen-dokumen (dari studi kepustakaan).

## IV. TEMUAN DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

### A. Profil MTs SA Sasaran

MTs SA yang menjadi sasaran penelitian adalah MTs SA yang berada di Pulau Jawa. Jumlah wilayah penelitian terdiri dari empat (4) propinsi yaitu: Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Dari keempat propinsi tersebut kemudian dipilih 4 MTs SA. Total jumlah sasaran penelitian adalah 16 MTs SA.

Tabel. 2 : Daftar MTs SA Sasaran, Luas Lokasi, Paket Bantuan dan Tahun Penerimaan Siswa

No.	Nama MTs. SA	Luas Tanah	Tipe MTs. SA	Tahun Menerima Siswa	Yayasan Pembina
1	Darul Muhsinin, Lebak, Banten	3600 m <sup>2</sup>	M1	-	Yayasan Darul Muhsinin
2	Miftahul Ulum, Pandeglang, Banten	3000 m <sup>2</sup>	M1	2009/2010	Yayasan Miftahul Ulum
3	Hidayatul Athfal, Serang, Banten	4500 m <sup>2</sup>	M1	2006/2007	Yayasan Pendidikan Hidayatul Athfal
4	Nurul Huda, Tangerang, Banten	2000 m <sup>2</sup>	M2	2008/2009	YPI Nurul Huda
5	Nurul Huda, Bekasi, Jabar	20400 m <sup>2</sup>	M1	2007/2008	YPI Nurul Huda
6	Nurul Falah, Garut, Jabar	1500 m <sup>2</sup>	M2	2009/2010	Yayasan Ikhwatul Hasanah
7	Raudatushibyan, Sukabumi, Jabar	2500 m <sup>2</sup>	M2	2010/2011	Yayasan Al-Qurthubiyah
8	Darul Fikri, Tasikmalaya, Jabar	1525 m <sup>2</sup>	M2	2009/2010	YPI Al-Makmun
9	Al-Ihsan, Kebumen, Jateng	1431 m <sup>2</sup>	M2	2007/2008	Yayasan Al-Ihsan

10	Al-Hidayah Purwodadi Jateng	1500 m <sup>2</sup>	M2	2007/2008	PP Al-Qur'an al-Hidayah
11	Al-Islam Sukoharjo Jateng	1500 m <sup>2</sup>		2009/2010	Al-Islam Sukoharjo
12	Rungkat Losari Brebes	1630 m <sup>2</sup>		2009/2010	Pendidikan Islam
13	Kota Malang Jaitim	1661 m <sup>2</sup>		2009/2010	Bina Lembaga Pesantren
14	Sabilul Muttaqin Pamekasan	1800 m <sup>2</sup>		2008/2009	PP Sabilul Muttaqin
15	Roudlotul Karomah Pasuruan	4570 m <sup>2</sup>		2008/2009	Roudlotul Karomah
16	Miftahul Ulum	3640 m <sup>2</sup>		2008/2009	Miftahul Ulum

Dari 16 MTs SA di atas, dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok MTs-SA, yaitu:

- 1) MTs-SA yang pada tahun 2010 telah meluluskan siswa. MTs SA dalam kategori ini meliputi MTs-SA Hidayatul Athfal Serang Banten; MTs-SA Nurul Huda Bekasi Jawa Barat; MTs-SA Al Ihsan Kebumen; MTs-SA Al Nurul Huda Tangerang Banten; MTs-SA Darul Fikri Tasikmalaya; MTs-SA Sabillul Muttaqin Pamekasan; dan MTs-SA Miftahul Ulum Sampang;
- 2) MTs-SA yang sudah berjalan, namun belum meluluskan siswa, meliputi; MTs-SA Miftahul Ulum Pandeglang Banten; MTs-SA Nurul Falah Garut; MTs-SA Raudatul Sibyan Sukabumi; MTs-SA Al' Islam Sukoharjo Jateng; MTs-SA Al Hidayah Jateng; MTs-SA Kota Malang; MTs-SA Raudatul Karomah Pasuruan; dan MTs-SA Rungkat Losari Brebes.
- 3) MTs- SA yang baru membuka kelas, yaitu MTs Darul Muhsinin Lebak Banten.

## B. Pengembangan Akses Pendidikan

### 1. Ketersediaan layanan

Program MTs. SA tidak berarti membangun sekolah dari awal, bukan dari tidak ada menjadi ada, melainkan pengembangan atas madrasah yang sudah ada dan memenuhi kriteria untuk dipilih menjadi MTs-SA. Karena itu, MTs-SA telah terlebih dahulu memiliki sarana dan prasarana untuk pendidikan, termasuk sumber daya manusia, ruang kelas, dan lain sebagainya.

MTs-SA memiliki kondisi yang berbeda dalam pemberian layanan pendidikan bagi siswa. Perbedaan tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua, berdasarkan cikal bakal berdirinya MTs-SA, yaitu pondok pesantren dan non pondok pesantren. Temuan di

lapangan menunjukkan bahwa MTs-SA yang didahului dengan keberadaan pondok pesantren memiliki kesiapan yang lebih baik dalam pemberian layanan pendidikan terhadap para siswa. Sarana dan prasarana yang dimiliki, meskipun masih terbatas, masih lebih baik dibandingkan dengan MTs. SA yang tidak didahului dengan keberadaan pondok pesantren.

a. Pengembangan Sarana Kelas

Tabel. 3: Pengembangan Akses Pendidikan Melalui Penyediaan Ruang Kelas Baru

Nama MTs. SA	Tahun Ajaran Menerima Siswa	Jumlah Siswa pada TA 2010/2011	Rombongan Belajar	Jumlah Ruang Kls.	Ukuran Kelas
Darul Muhsinin, Lebak, Banten	-	-	-	6	7 x 9 m
Miftahul Uhm, Pandeglang, Banten	2009/2010	95	3	6	7 x 9 m
Hidayatul Athfal, Serang, Banten	2006/2007	249	6	6	7 x 9 m
Nurul Huda, Tangerang, Banten	2008/2009	276	7	3	7 x 9 m
Nurul Huda, Bekasi, Jabar	2007/2008	165	5	9	7 x 9 m
Nurul Falah, Garut, Jabar	2009/2010	101	3	3	7 x 9 m
Raudatusshibyan, Sukabumi, Jabar	2010/2011	79	2	3	7 x 9 m
Darul Fikri, Tasikmalaya, Jabar	2009/2010	120	3	3	7 x 9 m
Al-Ihsan, Kebumen, Jateng	2007/2008	102	3	3	7 x 9 m
Al-Hidayah, Purwodadi, Jateng	2007/2008	305	7	3	7 x 9 m
Al-Islam, Sukoharjo, Jateng	2009/2010	88	2	3	7 x 9 m
Rungkat Losari, Brebes, Jateng	2009/2010	78	2	3	7 x 9 m
MTs. SA Kota Malang, Jatim	2009/2010	6	1	3	7 x 9 m
Sabilul Muttaqin, Pamekasan, Jatim	2008/2009	95	3	3	7 x 9 m
Roudlotul Karomah, Pasuruan, Jatim	2008/2009	97	3	3	7 x 9 m
Miftahul Uhm, Sampang, Jatim	2008/2009	105	3	3	7 x 9 m

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa mayoritas MTs-SA yang menjadi sasaran penelitian ini secara umum sudah mempunyai ruang kelas yang telah dapat menampung jumlah santri, hal ini dapat dilihat dari data di atas semua kelas yang tersedia dapat menampung jumlah santri yang terdaftar, walaupun ada 2 ( MTs-SA) yang santri nya cukup banyak, ini dapat dilihat untuk MTs-SA Hidayatul Athfat Serang Banten dengan jumlah santri 249 dengan konsekuensi jumlah kelas yang ideal nya jumlah kelas 8 kelas sementara kelas yang ada hanya 6, demikian

juga halnya dengan MTs-SA Nurul Huda Banten, dengan jumlah siswa 276 siswa sementara jumlah kelas hanya 3, sedangkan idealnya dibutuhkan jumlah ruang kelas minimal 9 kelas.

#### b. Profil Pendidik MTs SA

Temuan penelitian menunjukkan bahwa hampir seluruh MTs-PSA belum didukung oleh SDM yang memadai, karena masih banyak ditemukan kekurangan jumlah atau rasio antara guru dengan siswa yang tidak berimbang. Jumlah peminat yang besar membuat MTs-PSA selalu bertambah setiap tahunnya, namun ini tidak didukung oleh peningkatan sumber daya madrasah, seperti peningkatan jumlah guru dan ruang kelas. Terdapat beberapa madrasah yang masih kekurangan ruang kelas dan guru karena jumlah siswa yang relatif banyak. Berikut adalah profil guru-guru jumlah siswa aktif dan kelas yang terdapat pada 15 MTs-PSA yang diteliti.

Tabel. 4 Profil Guru MTs-PSA

Nama MTs. SA	Jumlah Siswa pada TA 2010/2011	Jumlah Guru	Kualifikasi Pendidikan Guru						
			S2	S1	D3	D2	D1	SMA	Pontren
Darul Muhsinin, Lebak, Banten			Belum Operasional						
Miftahul Ulum, Pandeglang, Banten	95	14	-	3	-	5	-	6	-
Hidayatul Athfal, Serang, Banten	249	26	-	12	-	5	-	9	-
Nurul Huda, Tangerang, Banten	276	22	-	22	-	-	-	-	-
Nurul Huda, Bekasi, Jabar	165	14	-	11	-	3	-	-	-
Nurul Falah, Garut, Jabar	101	12	-	9	-	-	-	3	-
Raudatusshiban, Sukabumi, Jabar	79	19	-	13	1	1	-	3	1
Darul Fikri, Tasikmalaya, Jabar	120	22	-	18	2	-	-	1	1
Al-Ihsan, Kebumen, Jateng	102	17	1	14	1	-	-	1	-
Al-Hidayah, Purwodadi, Jateng	305	14	-	12	2	-	-	-	-
Al-Islam, Sukoharjo, Jateng	88	15	-	12	2	-	-	-	1
Rungkat Losari, Brebes, Jateng	78	14	-	8	3	-	-	1	2
MTs.SA Kota Malang, Jatim	6	17	-	12	3	1	-	-	1
Sabilul Muttaqin, Pamekasan, Jatim	95	15	1	14	-	-	-	-	-
Roudlotul Karomah, Pasuruan, Jatim	97	17	1	13	2	-	-	-	1
Miftahul Ulum, Sampang, Jatim	105	14	-	8	-	2	-	4	-

Berdasarkan tingkat pendidikannya, mayoritas guru di MTs-PSA yang diteliti telah berpendidikan S1. Hanya sedikit yang

belum memperoleh gelar kesarjanaan penuh. Namun yang menjadi kendala adalah dalam hal rasio antara guru dan siswa. Kondisi tidak kondusif terdapat di MTs. Al-Hidayah Purwodadi, dengan jumlah siswa yang besar, yakni 305, namun tenaga guru yang tercatat adalah sebanyak 14 guru. Kondisi ini bertolak belakang dengan kondisi guru di MTs-PSA Raudhatushiban, Sukabumi.

## **2. Tingkat Keterjangkauan Layanan**

Secara umum, respon masyarakat terhadap kehadiran MTs. SA sangat positif. Hampir semua masyarakat tempat MTs. SA berada, mengatakan gembira dengan kehadiran MTs. SA. Respon positif tidak hanya terlihat dari selalu meningkatnya jumlah siswa baru setiap tahunnya, namun dari antusiasme masyarakat dalam mendukung keberadaan atau kehadiran MTs. SA, seperti bantuan yang lahir sejak awal pendirian gedung MTs. SA.

Misalnya yang dialami oleh MTs Al-Hidayah, Purwodadi, Jawa Tengah. Semenjak MTs. SA ini dibuka untuk siswa baru tahun 2008/2009 mendapatkan respon luar biasa dari masyarakat. Indikator dari respon seperti ini dapat dilihat dari minat orang tua dalam menyekolahkan anak-anaknya di MTs. Al Hidayah. Pada tahun 2008 siswa yang masuk sebanyak 76 siswa; Pada tahun 2009 siswa yang masuk sebanyak 97 siswa; Pada tahun 2010 ditargetkan menerima sebanyak 120 siswa.

Dengan perkembangan siswa yang semakin meningkat maka ini dapat diartikan sebagai respon masyarakat dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap madrasah mulai ada. Namun peningkatan jumlah siswa ini tidak paralel dengan peningkatan layanan pendidikan, terutama ruang kelas yang dapat mengakomodasi antusiasme masyarakat dalam menyekolahkan putra-putri mereka di MTs. SA.

Namun dari gejala umum, ada MTs-SA yang mendapatkan respon yang kurang positif. Misalnya kasus MTs. SA Kota Malang. Respon masyarakat terhadap kehadiran MTs-SA Kota Malang ini relatif rendah, yang ditandai dengan kecilnya jumlah siswa yang diterima setiap tahun. MTs. SA Kota Malang ini perlu mendapat

pembinaan dan perhatian lebih karena sumbangan MTs ini terhadap peningkatan APK masih relatif kecil.

#### a. Latar Belakang Geografis

Infrastruktur yang ada di sekitar MTs. SA belum memadai. Masih banyak MTs. SA yang berada di pedalaman dan tidak didukung oleh akses jalan yang memadai. Hal ini membuat kesulitan bagi siswa dan juga para guru untuk mencapai sekolah. Seperti yang terjadi di MTs. Miftahul Ulum, Pandeglang. Pelaksanaan proses belajar mengajar di sekolah ini masih belum optimal, karena kondisi geografis dan sarana transportasi yang kurang mendukung.

Salah satu pertimbangan yang digunakan sebelum mendirikan MTs-SA adalah bahwa tidak terdapat lembaga pendidikan sederajat pada radius 5 km. Kenyataan yang terjadi di lapangan adalah bahwa hampir semua MTs-SA dibangun di daerah yang telah berdiri SMP dan atau MTs pada radius 5 km. Hal ini nampaknya menjadi salah satu penyebab rendahnya jumlah siswa pada beberapa MTs-SA. Peta lembaga pendidikan di daerah MTs-SA dapat disajikan dalam tabel berikut.

Tabel. 5 Peta Lembaga Pendidikan

Nama MTs. SA	Peta Lembaga Pendidikan SD sederajat		Peta Lembaga Pendidikan SMP sederajat	
	< 5km	5 -15 km	< 5km	5 -15 km
Darul Muhsinin, Lebak, Banten	3	9	1	8
Miftahul Ulum, Pandeglang, Banten	2	3	2	4
Hidayatul Athfal, Serang, Banten	6	1	5	2
Nurul Huda, Tangerang, Banten	5	3	1	4
Nurul Huda, Bekasi, Jabar	6	3	3	5
Nurul Falah, Garut, Jabar	1	3	0	4
Raudatushibyan, Sukabumi, Jabar	5	4	2	5
Darul Fikri, Tasikmalaya, Jabar	4	8	3	3
Al-Ihsan, Kebumen, Jateng	4	6	2	4
Al-Hidayah, Purwodadi, Jateng	4	24	3	8
Al-Islam, Sukoharjo, Jateng	6	12	2	14
Rungkat Losari, Brebes, Jateng	9	11	1	8
MTs.SA Kota Malang, Jatim	3	7	2	5
Sabilul Muttaqien, Pamekasan, Jatim	5	5	2	6
Roudlotul Karomah, Pasuruan, Jatim	6	4	3	4
Miftahul Ulum, Sampang, Jatim	4	3	0	2

## b. Latar Belakang Sosial Ekonomi Siswa

Program MTs. SA bertujuan untuk pemerataan pendidikan, sehingga anak-anak usia sekolah dapat dengan mudah dan murah memperoleh pendidikan dasar yang menjadi kewajiban pemerintah. Secara umum, pemilihan sekolah yang bersangkutan untuk menjadi sekolah SA adalah sudah tepat. Sebagian MTs. SA yang diteliti berada pada lingkungan geografis yang tepat, sehingga kehadirannya telah dapat memenuhi harapan masyarakat akan pendidikan dasar bagi putra-putri mereka.

Secara sosiologis, MTs. SA didirikan di masyarakat pedesaan dengan kemampuan ekonomi yang relatif rendah. Kehadiran MTs. SA dapat memenuhi harapan masyarakat akan pendidikan yang murah dan mudah dijangkau. Sebagian besar masyarakat di sekitar MTs. SA menunjukkan antusiasime mereka ketika daerah mereka dipilih sebagai salah program MTs. SA.

Berikut adalah kondisi sosial ekonomi siswa pada ke-16 MTs-PSA yang diteliti.

Tabel. 6 Kondis Sosial Ekonomi Siswa MTs-PSA

Nama MTs. SA	Jumlah Siswa	Pekerjaan Orang Tua Siswa				Pendapatan Orang Tua Siswa		
		Buruh	Tani	PNS /TNI	Swasta	< Rp.500.000	Rp.500.000 - Rp. 2.000.000	> Rp.2.000.000
Darul Muhsinin, Lebak, Banten								
Miftahul Uhm, Pandeglang, Banten	95	56	33	5	1	87	6	2
Hidayatul Athfal, Serang, Banten	249	161	55	12	15	169	74	6
Nurul Huda, Tangerang, Banten	276	96	149	8	23	241	28	7
Nurul Huda, Bekasi, Jabar	165	99	50	16		156	9	-
Nurul Falah, Garut, Jabar	101	69	3	6	23	69	32	-
Raudatusshibyan, Sukabumi, Jabar	79	16	60	1	2	26	50	3
Darul Fikri, Tasikmalaya, Jabar	120	43	54	5	18	79	33	8
Al-Ihsan, Kebumen, Jateng	102	8	74	5	15	79	22	1
Al-Hidayah, Purwodadi, Jateng	305	32	237	28	8	279	22	4
Al-Islam, Sukoharjo, Jateng	88	16	33	11	26	58	21	9
Rungkat Losari, Brebes, Jateng	78	32	29	6	11	65	9	4
MTs.SA Kota Malang, Jatim	6	3	-	-	3	3	3	-
Sabihul Muttaqien, Pamekasan, Jatim	95	38	42	8	7	58	32	5
Roudlotul Karomah, Pasuruan, Jatim	97	-	60	-	37	73	24	-
Miftahul Uhm, Sampang, Jatim	105	-	105	-	-	98	7	-

Dari total 1961 siswa yang tercatat pada ke-16 MTs-SA (siswa aktif), mayoritas orang tuanya adalah bekerja sebagai petani, yaitu sebanyak 50,48%. Dilihat dari penghasilannya, sebanyak 78,53% orang tua siswa berpenghasilan di bawah Rp. 500.000,-. Hanya tercatat sebanyak 2,50% orang tua siswa yang berpenghasilan di atas Rp. 2juta.

#### c. Latar Belakang Pendidikan Siswa

Data hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah SD pada daerah-daerah yang didirikan MTs-SA memang relatif lebih banyak dibandingkan dengan MI. dan, jumlah siswa di MI rata-rata lebih sedikit dibandingkan jumlah siswa SD. Menurut beberapa Kepala Sekolah MTs-SA, hal ini disebabkan oleh kecenderungan orang tua untuk menyekolahkan anak mereka di SD. Dari total 1961 siswa pada ke-16 MTs-SA, sebanyak 1385 siswa berasal dari SD, atau sekitar 70,63%. Siswa yang berasal dari MI adalah sebanyak 545 siswa (57,80%). Jumlah siswa pindahan relatif sedikit, yaitu 31 orang atau sekitar 15,80%.

#### d. Perkembangan Siswa

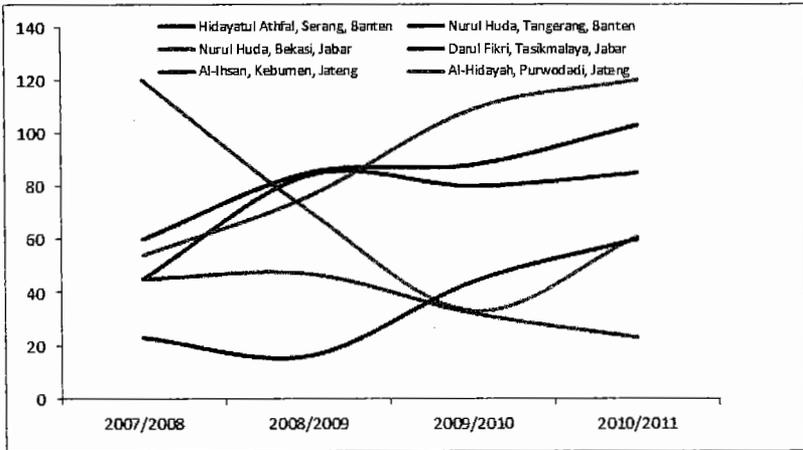
Deskripsi perkembangan siswa untuk masing-masing MTs-SA menunjukkan gambaran yang bervariasi. Ada yang meningkat, ada yang menurun dan ada yang belum berhasil menyelenggarakan pembelajaran. Dari 16 sasaran penelitian menunjukkan bahwa MTS-SA yang berhasil meningkatkan jumlah siswa sebanyak 9 MTs-SA (56.25 %); MTs-SA yang perkembangan siswanya fluktuatif sebanyak 3 MTs-SA (18.75%); MTS-SA yang perkembangan siswanya menunjukkan gejala menurun terjadi di 2 MTs-SA; dan MTs-SA yang belum berjalan 2 MTs-SA selengkapnya lihat tabel berikut.

Tabel. 7 Jumlah Siswa Baru pada MTs.PSA

Nama MTs. SA	2008/2009		Jumlah	2009/2010		Jumlah	2010/2011		Jumlah	Total	Trend
	Lk.	Pr.		Lk.	Pr.		Lk.	Pr.			
Darul Muhsinin, Lebak, Banten											Belum operasional
Miftahul Uhm, Pandeglang, Banten	-	-	-	11	12	23	32	40	72	95	Meningkat
Hidayatul Arifal, Serang, Banten	40	44	84	40	40	80	48	37	85	294	Meningkat
Nurul Huda, Tangerang, Banten	38	47	85	42	46	88	49	54	103	336	Meningkat
Nurul Huda, Bekasi, Jabar	35	36	71	12	21	33	25	36	61	285	Fluktuatif
Nurul Falah, Garut, Jabar	-	-	-	34	37	71	13	17	30	101	Menurun
Raudatusshibyan, Sukabumi, Jabar	-	-	-	-	-	-	47	32	79	79	Baru 1 kelas
Darul Fikri, Tasikmalaya, Jabar	6	10	16	29	15	44	24	36	60	143	Meningkat
Al-Ihsan, Kebumen, Jateng	18	29	47	12	20	32	10	13	23	147	Menurun
Al-Hidayah, Purwodadi, Jateng	39	37	76	44	65	109	73	47	120	359	Meningkat
Al-Islam, Sukoharjo, Jateng	-	-	-	21	16	37	29	22	51	88	Meningkat
Rungkat Losari, Brebes, Jateng	-	-	-	19	17	36	24	18	42	78	Meningkat
MTs.SA Kota Malang, Jatim	-	-	-	4	2	6	-	-	-	6	Tidak ada siswa baru
Sabihul Muttaqin, Pamekasan, Jatim	22	13	35	16	20	36	12	10	24	95	Fluktuatif
Roudlotul Karomah, Pasuruan, Jatim	13	20	33	16	11	27	21	16	37	97	Fluktuatif
Miftahul Uhm, Sampang, Jatim	10	10	20	9	21	30	23	32	55	105	Meningkat
Total Jumlah Siswa	198	216	414	284	311	595	386	362	750	2106	Meningkat

Dari tabel di atas terlihat bahwa kondisi masing-masing MTs-PSA berbeda dalam hal penerimaan siswa baru pada setiap tahun ajarannya. Secara keseluruhan, terdapat kecenderungan peningkatan jumlah siswa baru pada setiap tahun ajarannya. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa kepala madrasah diperoleh informasi bahwa peminat MTs.-PSA sebenarnya cukup besar, namun karena keterbatasan ruang kelas sehingga daya tampung madrasah menjadi terbatas dan madrasah tidak dapat menerima siswa melebihi kapasitasnya. Berikut ini grafik MTs-SA yang telah mengikuti Ujian negara. Grafik siswa menunjukkan sebagai berikut

Gambar. 1 Trend Jumlah Siswa Baru Pada 6 MTs-SA pada 3 TA terakhir



Ilustrasi di atas memberikan gambaran tentang pola penerimaan siswa baru pada ke-6 MTs tersebut. Secara umum, jumlah siswa baru meningkat, namun ada beberapa MTs-SA yang menurun jumlah siswanya. Misalkan yang terjadi pada MTs. Al-Ihsan, jumlah siswa baru cenderung menurun, yang ini disebabkan oleh keterbatasan ruang kelas, sedangkan pada 2 tahun pertama MTs-PSA ini sudah menerima siswa dalam jumlah yang banyak. Konsekuensinya, pada tahun ketiga dan keempat, jumlah siswa baru yang diterima disesuaikan dengan ketersediaan ruang kelas yang di MTs-PSA.

### C. Tata Kelola MTs-SA

Dalam pengelolaannya, MTs. SA adalah berada di bawah yayasan pembinaanya. Namun, pihak yayasan memberikan kebebasan bagi pihak madrasah untuk mengembangkan dan mengelola madrasah secara mandiri atau otonom. Dengan kondisi seperti ini, peran kepala madrasah menjadi strategis dan menentukan. Kepemimpinan ini merupakan fungsi inti dan efektifitas manajemen di setiap sekolah, misalnya; perencanaan, pengorganisasian, peman-

tauan, dan sebagainya. Kepala MTs. SA yang berfungsi sebagai pemimpin madrasah secara manajerial dituntut untuk mampu mengelola madrasah yang dipimpinnya, agar madrasah tersebut tumbuh dan berkembang sesuai tuntutan kebutuhan masyarakat. Kepala madrasah merupakan pimpinan madrasah yang mempunyai berbagai tugas baik sebagai administrator maupun supervisor. Tugas kepala madrasah sebagai administrator harus mampu menjalankan administrasi pendidikan yang berkaitan dengan proses penumbuhan aktivitas yang bersifat khusus (pendidikan melalui kegiatan perencanaan, pengorganisasian, dan pembinaan baik berkaitan dengan sumberdaya manusia maupun mengenai sumber daya non manusia. Tujuannya, agar terwujud situasi proses pembelajaran yang dinamis dan kreatif.

Secara umum, temuan di penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan MTs. SA adalah merupakan hasil sinergi antar pihak-pihak yang terlibat, yaitu pihak madrasah selaku pelaksana operasional sekolah, komite madrasah, dan yayasan pembina. Model pengelolaan seperti adalah lazim ditemukan di banyak sekolah-sekolah swasta. Yang banyak ditemukan pada saat penelitian ini dilakukan adalah dominannya peran manajemen madrasah, dari kepala madrasah sampai para guru, dalam menjalankan semua hal yang berhubungan dengan penyelenggaraan pendidikan. Banyak yayasan pembina MTs. SA memberikan otonomi yang penuh terhadap pihak sekolah untuk mengembangkan diri dan meningkatkan madrasah ke arah yang lebih maju. Otonomi ini seolah memberikan kesan bahwa pihak yayasan lepas tangan terhadap tanggung jawab pelaksanaan pendidikan di MTs. SA. Namun yang ditemukan di lapangan adalah bahwa pihak yayasan tetap memantau apa yang terjadi di sekolah. Mereka aktif dilibatkan oleh kepala madrasah dalam setiap pengambilan keputusan penting guna pengembangan sekolah.

Yang perlu ditingkatkan perannya adalah komite madrasah. Temuan di lapangan banyak menunjukkan belum optimalnya pemanfaatan potensi dan fungsi strategis yang dimiliki oleh komite madrasah. Banyak MTs. SA yang mengatakan bahwa peran

komite madrasah masih dapat ditingkatkan lagi guna pengembangan dan peningkatan kualitas pendidikan di MTs. SA.

Berikut ini uraian secara umum aspek-aspek yang diteliti dalam tata kelola MTs. SA.

### 1. Kepemimpinan

Posisi kepala madrasah yang strategis menuntut kemampuan manajerial yang baik, sehingga potensi-potensi madrasah dapat dikembangkan secara optimal, dan ancaman-ancaman yang mungkin muncul dapat diatasi dengan baik. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa kepala madrasah adalah sosok yang menentukan keberhasilan pelaksanaan program madrasah. Meskipun bukan sebagai *single fighter*, namun kemampuan mengelola menentukan keberhasilannya sebagai pemimpin. Dan sejauh pengamatan peneliti, kepala MTs. SA sudah dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, sehingga program-program madrasah dapat tercapai dengan optimal. Meskipun ada madrasah yang perlu lebih diperhatikan seperti MTs. SA Kota Malang yang menunjukkan belum adanya peningkatan dalam kinerja lembaganya. Terlepas dari kondisi-kondisi eksternal yang mungkin mempengaruhi madrasah, kepala madrasah tetap bertanggung jawab sebagai pimpinan tertinggi di madrasah untuk mengembangkan madrasah ke arah yang lebih baik.

Kepala madrasah adalah pemimpin di level sekolah. Ia menjadi penentu keberhasilan program-program pendidikan yang ingin dicapai untuk mewujudkan visi dan misi madrasah. Hasil evaluasi terhadap kinerja kepala madrasah MTs. SA menunjukkan bahwa penetapan seseorang menjadi kepala madrasah telah dengan baik dilakukan. Sebagian besar kepala MTs. SA merupakan figur-figur dengan kompetensi dan pengalaman. Kinerja lembaga menunjukkan peningkatan dari tahun-tahun ke tahun. Jumlah siswa baru dan kualitas pendidikan dengan indikator angka kelulusan pada Ujian Nasional menunjukkan peningkatan. Hal ini menjadi indikasi keberhasilan kepala madrasah dalam mengelola madrasah. Figur yang tepat yang memimpin MTs. SA secara umum

mampu menciptakan komunikasi yang baik dengan para stakeholders. Dengan berjalannya program pendidikan di MTs. SA adalah merupakan sinergi antar pihak-pihak yang berkepentingan.

Tidak banyak kendala yang sebenarnya dihadapi kepala madrasah yang berhubungan dengan kepemimpinan. Permasalahan muncul ketika kepala madrasah harus mengelola sumber daya yang terbatas untuk mencapai suatu tujuan yang berat. Misalkan, ketika madrasah dituntut untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di MTs. SA, dilema yang muncul adalah ketika sarana dan prasarana pendukung tercapainya tujuan tersebut yang masih terbatas. Setiap sekolah, termasuk kepala madrasah, tentunya akan kesulitan mencapai target kelulusan 100% pada Ujian Nasional ketika kualitas pembelajaran menjadi sesuatu yang sulit diwujudkan karena keterbatasan sumber daya sekolah.

## 2. Kemandirian

Kepemimpinan yang baik akan dapat mendorong madrasah untuk menjadi lebih mandiri. Tidak hanya dalam operasionalisasi pendidikan di sekolah, tapi juga dalam hal pembiayaan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa hampir seluruh MTs. SA telah mampu melaksanakan program pendidikan secara mandiri, karena didukung oleh sarana prasarana dan SDM yang cukup. Para guru dalam mengajar lebih didasarkan pada semangat *ruhul jihad* dan *ikhlas beramal*. Para pelaku sadar bahwa tugas yang mereka terima adalah amanah, lebih merupakan media untuk mencari keridhaan Allah.

Di sisi yang lain, yakni dalam hal pembiayaan, ketergantungan MTs. SA terhadap bantuan luar masih sangat terlihat. Siswa yang dibebaskan dari biaya pendidikan, membuat pihak pengelola harus pintar-pintar menjadi donatur luar guna pembiayaan operasionalisasi madrasah. Meskipun masih sangat kurang, namun pendidikan tetap berjalan.

## 3. Transparansi

MTs. SA berupaya untuk melibatkan semua unsur pemangku kepentingan walaupun upaya yang dilakukan masih belum

sempurna. Sementara upaya yang dilakukan untuk mengarah pada transparansi adalah penataan: (1) Mekanisme yang menjamin sistem keterbukaan dan standarisasi dari semua proses pelayanan publik di madrasah, (2) Mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan publik tentang berbagai kebijakan dan pelayanan publik, maupun proses-proses di dalam sektor publik. Mekanisme yang memfasilitasi pelaporan, penyebaran informasi, tindakan penyelesaian penyimpangan atas berbagai aspek pelayanan publik di lingkungan civitas akademika, pada akhirnya madrasah menjadi bertanggung jawab kepada semua pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang berkepentingan dengan proses maupun kegiatan dalam sektor publik. Bersamaan dengan penataan sistem, media komunikasi dan informasi melalui rapat-rapat bersama *stakeholder* dalam rangka menciptakan transparansi pendidikan menjadi alternatif peningkatan transparansi.

Komunikasi antar pemangku kepentingan (*stakeholders* dan penyelenggara) yang telah berjalan baik selama ini merupakan mekanisme yang baik dalam menciptakan transparansi. Kepala madrasah tidak menjadi sewenang-wenang karena harus bertanggung jawab, tidak hanya pada yayasan pembina, namun juga pada madrasah. Pihak yayasan juga menjadi lebih bertanggung jawab, karena otonomi yang diberikan kepada pihak pengelola madrasah membuat keseimbangan manajemen pengelolaan pendidikan di MTs. SA.

Kendala yang kadang dijumpai, meski tidak di seluruh MTs. SA adalah belum optimalnya kinerja salah satu unsur pendukung, seperti Komite Madrasah. Terdapat MTs. SA yang komite madrasah belum optimal, karena hanya merupakan formalitas saja. Hal ini mengakibatkan komunikasi antara komite madrasah dan manajemen madrasah menjadi tidak optimal, dan akan berdampak pada pencapaian tujuan yang ingin diraih oleh program MTs. SA. MTs. SA Kota Malang contohnya, yang menunjukkan kinerja kelembagaan yang perlu ditingkatkan ke arah yang lebih baik.

#### D. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan di MTs-SA dapat disajikan dalam tabel berikut.

Tabel. 8 Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan di MTs-SA

Nama MTs. SA	Komponen Masyarakat						Kontribusi
	Masyarakat umum	Yayasan	Komite Madrasah	Ormas/ orpol	Pemda	Badan Usaha	
Darul Muhsinin, Lebak, Banten	5	2,3,4,5	1,4	-	-	-	(1) Perencanaan
Miftahul Uhm, Pandeglang, Banten	5	2,3,4,5	1,4	-	-	-	(2) SDM
Hidayatul Athfal, Serang, Banten	5	2,3,4,5	1	-	-	-	(3) Dana
Nurul Huda, Tangerang, Banten	5	2,3,4,5	1,3	-	-	-	(4) Pengawasan
Nurul Huda, Bekasi, Jabar	5	2,3,4,5	3	-	-	-	(5) Tenaga
Nurul Falah, Garut, Jabar	1	2,3,4,5	1	-	1	-	
Raudatusshibyan, Sukabumi, Jabar	5	2,3,4,5	1	-	-	-	
Darul Fikri, Tasikmalaya, Jabar	5	2,3,4,5	1	-	-	-	
Al-Ihsan, Kebumen, Jateng	5	2,3,4,5	1	-	-	-	
Al-Hidayah, Purwodadi, Jateng	5	2,3,4,5	1	-	-	-	
Al-Islam, Sukoharjo, Jateng	5	2,3,4,5	1	-	-	-	
Rungkat Losari, Brebes, Jateng	5	2,3,4,5	1	-	-	-	
MTs. SA Kota Malang, Jatim	5	2,3,4,5	-	-	-	-	
Sabihul Muttaqien, Pamekasan, Jatim	5	2,3,4,5	1	-	-	-	
Roudlotul Karomah, Pasuruan, Jatim	5	2,3,4,5	1	-	-	-	
Miftahul Uhm, Sampang, Jatim	5	2,3,4,5	1	-	-	-	

Secara umum, elemen masyarakat yang banyak memberikan partisipasinya dalam penyelenggaraan pendidikan di MTs-SA adalah pihak yayasan penyelenggara. Empat hal yang sering dilakukan oleh pihak yayasan adalah dalam hal penyediaan SDM (tenaga pendidik dan kependidikan, dana, pengawasan, dan tenaga). Dari komponen masyarakat, kontribusi yang diberikan masih sebatas bantuan tenaga pada saat-saat awal pembangunan MTs-SA. Komite madrasah, dengan posisi strategisnya masih terbatas perannya pada aspek perencanaan. Komponen masyarakat yang lain, seperti ormas/orpol, pemerintah daerah, dan badan usaha juga masih minim memberikan bantuannya terhadap penyelenggaraan pendidikan di MTs-SA.

## 1. Bentuk Partisipasi masyarakat

Wujud nyata partisipasi masyarakat terhadap MTs. SAdapat diidentifikasi ke dalam 2 bentuk, yaitu 1) partisipasi dalam bentuk menyekolahkan putra-putrinyan diMTs. SA, dan 2) partisipasi dalam bentuk sumbangsih tenaga, pemikiran, saran, dan kritik. Dari bentuk partisipasi pertama, ada kecenderungan umum peningkatan jumlah siswa yang mendaftar di MTs. SA. Meskipun ada juga sekolah yang mencatatkan penurunan siswa baru, namun dalam jumlah yang kurang signifikan. Penurunan yang terjadi bukan karena kurangnya minat masyarakat untuk menyekolahkan anak mereka di MTs. SA, namun lebih merupakan keterbatasan daya tampung MTs. SA yang kekurangan ruang belajar.

Partisipasi yang kedua dari masyarakat adalah dalam bentuk sumbangan tenaga, pemikiran, saran dan kritik. Di MTs. SA yang terletak di desa pedalaman, partisipasi masyarakat lebih terasa, apalagi ketika yayasan yang dipilih menjadi MTs. SA adalah merupakan pondok pesantren. Budaya monarki yang hidup di masyarakat religus pedesaan menjadi pendorong partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung program MTs.

Mencermati fakta empirik yang terjadi di lapangan, temuan lebih banyak menunjukkan partisipasi masyarakat yang masih sangat terbatas. Ketergantungan MTs. SA terhadap bantuan pemerintah membuat gerak kerja manajemen madrasah menjadi terbatas. Ketika MTs. SA dibangun di atas pondasi baru (bukan dari pondasi pondok pesantren yang biasanya telah kokoh), peran serta masyarakat tersebut masih perlu ditingkatkan. Disaat pemerintah masih berbenah diri untuk dapat memperbaiki perhatian dan bantuannya guna peningkatan kualitas pendidikan, di situlah peran masyarakat dibutuhkan. Masyarakat umum harus lebih berperan aktif dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan. Yang selama ini terjadi adalah sekolah atau madrasah diberikan beban yang luar biasa berat untuk mengajar dan mendidik anak-anak bangsa guna dapat berguna dan bermanfaat di hari depan. Di sisi yang lain, keterbatasan-keterbatasan yang ada membuat sekolah tidak dapat optimal menjalankan amanat yang diberikan oleh

masyarakat. Karena itu peran serta masyarakat diharapkan dapat lebih ditingkatkan dan digiatkan guna pencapaian tujuan pendidikan, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa.

Segenap komponen masyarakat harus lebih diberdayakan, sehingga dapat secara optimal membantu program pendidikan pada MTs. SA. Pihak madrasah dan komite madrasah dituntut untuk dapat menjalin komunikasi yang baik dan sinergi yang positif untuk optimalisasi kontribusi dari masyarakat umum ini.

## 2. Peran Komite Madrasah

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, komite madrasah memiliki peran strategis dan dapat dikatakan sebagai humas madrasah. Komite madrasah yang baik akan dapat mendukung program sekolah terlaksana dengan baik. Di sebagian besar MTs. SA, peran komite sekolah telah terlihat dengan jelas, misalkan dengan penggalangan dana guna mendukung kegiatan pembelajaran. Namun ada juga komite sekolah yang masih belum optimal, karena kepengurusan yang tidak efektif.

Secara umum, komite madrasah pada MTs. SA telah menunjukkan kontribusi yang berarti, sehingga program pendidikan pada MTs. SA dapat berjalan. Kontribusi tersebut terlihat sejak awal program, yakni ketika inisiasi program madrasah SA. Komite madrasah, yang sebelumnya sudah ada, ikut berperan aktif untuk mewujudkan dan mensukseskan terlaksananya program MTs. SA. Kontribusi yang dilakukan tersebut antara lain berupa komunikasi dengan berbagai pihak (stakeholders) guna mendukung realisasi program MTs. SA, pengawasan terhadap tahapan-tahapan realisasi program, perencanaan program kerja, pengembangan sumber daya (mengadakan pelatihan guru untuk meningkatkan kompetensi guru), *hatta* peran aktif dalam mensukseskan program pembelajaran di MTs. SA yang telah berlangsung.

Tanpa mengabaikan peran aktif komite madrasah di atas, banyak MTs. SA masih terdapat ruang untuk dapat meningkatkan peran komite madrasah. Atau dengan kata lain, peran yang dilakoni oleh komite madrasah masih belum optimal. Diantara

faktor penyebab dari kondisi ini adalah, antara lain: adanya keterbatasan pengetahuan dan wawasan pengurus komite madrasah, manajemen komite madrasah belum dikelola dengan profesional, status kepengurusan komite yang belum jelas, dan adanya keterbatasan waktu para pengurus komite madrasah dalam berpartisipasi secara aktif untuk mendukung program pendidikan di madrasah ini.

Dari uraian di atas, menunjukkan bahwa Komite madrasah (MTs. SA Nurul Huda) telah berperan secara aktif untuk mendukung berbagai program pendidikan yang telah disusun oleh madrasah ini. Meskipun demikian, tentu peran komite madrasah tersebut tampaknya belum maksimal, ini dapat disebabkan beberapa faktor, antara lain; adanya keterbatasan pengetahuan dan wawasan pengurus komite madrasah, manajemen komite madrasah belum dikelola dengan profesional dan adanya keterbatasan waktu para pengurus komite madrasah dalam berpartisipasi secara aktif untuk mendukung program pendidikan di madrasah ini.

### 3. Peran Lembaga Terkait

Secara umum, lembaga-lembaga yang terkait dengan pendidikan, khususnya pada program MTs. SA, belum memberikan kontribusi berarti terhadap program pendidikan yang tengah berlangsung. Kontribusi yang begitu aktif dan intens adalah pada awal-awal program, yaitu pada tahap pembangunan dan persiapan awal program MTs. SA. Pada masa-masa awal program, banyak pihak yang ikut berperan, dari masyarakat umum hingga pemerintah desa. Bantuan pada masa awal program tersebut antara lain berbentuk kemudahan dalam memperoleh izin pembangunan, sumbangan tenaga dari masyarakat dalam proses pembangunan, kemudahan dan dalam memperoleh tanah untuk pengadaan bangunan madrasah.

Dari 16 MTs. SA yang dievaluasi, hanya terdapat satu madrasah yang memperoleh dukungan begitu positif dari pemerintah desa. Dukungan tersebut tidak hanya dalam bentuk moril, tapi juga

peran aktif dalam proses belajar, seperti yang dilakukan oleh Kepala Desa Panacaran, Pandeglang, dimana MTs. SA Miftahul Ulum berlokasi.

Secara umum, dukungan dari lembaga terkait ketika proses pendidikan sudah berlangsung di MTs. SA masih dirasakan kurang. Pemerintah daerah belum optimal dalam memberikan kontribusi dikarenakan alasan birokratis (perbedaan pengelola).

### E. Pembahasan

Dalam rangka pendidikan Satu Atap ini Kementerian Agama telah membangun Madrasah Tsanawiyah (MTs. SA) di berbagai wilayah secara terpadu dengan madrasah Ibtidaiyah atau satuan pendidikan dasar formal sederajat lainnya yang berlokasi di pesantren dan membangun Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) secara terpadu dengan Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) di bawah naungan Kementerian Agama.

Aspek-aspek yang dinilai untuk mengevaluasi pengembangan akses pendidikan ini adalah ketersediaan layanan, keterjangkauan layanan, dan respon masyarakat. Berdasarkan 3 aspek ini, penilaian terhadap pengembangan akses pendidikan pada MTs-SA yang diteliti dapat disajikan pada tabel berikut.

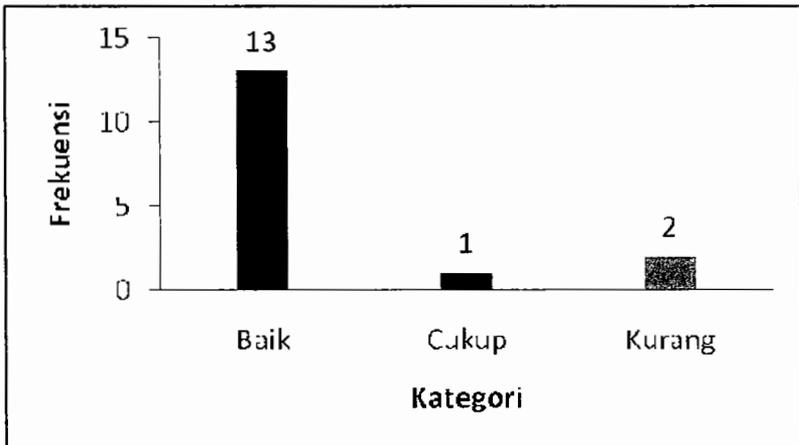
Tabel. 9 Pengembangan Akses Pendidikan Pada MTs-SA

No	Nama MTs. SA	Kategori			Keterangan
		Baik	Cukup	Kurang	
1	Darul Muhsinin, Lebak				Kriteria yang digunakan adalah: 1. Optimalisasi penggunaan ruang kelas
2	Miftahul Ulum, Pandeglang	☒			
3	Hidayatul Athfal, Serang	☒			
4	Nurul Huda, Tangerang	☒			2. Jumlah siswa yang cenderung meningkat 3.
5	Nurul Huda, Bekasi		☒		
6	Nurul Falah, Garut	☒		☒	
7	Raudatushibyan, Sukabumi	☒			
8	Darul Fikri, Tasikmalaya	☒			

9	Al-Ihsan, Kebumen, Jateng	?			Ketersediaan sarpras 4. Ketersediaan tenaga pendidik dan kependidikan
10	Al-Hidayah, Purwodadi, Jateng	?			
11	Al-Islam, Sukoharjo, Jateng	?			
12	Rungkat Losari, Brebes	?		?	
13	MTs.SA Kota Malang, Jatim			?	
14	Sabilul Muttaqien, Pamekasan, Jatim	?			
15	Roudlotul Karomah, Pasuruan	?			
16	Miftahul Ulum, Sampang	?			

Secara keseluruhan, mayoritas MTs-SA telah berhasil mengembangkan akses pendidikan bagi anak usia sekolah. Indikator utama yang tampak adalah jumlah siswa yang dapat diterima setiap tahunnya. Pada 3 tahun terakhir, jumlah siswa yang diterima pada MTs-SA menunjukkan peningkatan yang berarti. Hal ini dijadikan indikator utama karena tujuan utama dari pengembangan MTs-SA adalah untuk peningkatan akses pendidikan bagi anak usia sekolah.

Gambar. 2 Kategori Keberhasilan Pengembangan Akses Pendidikan pada MTs-SA



Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa sebanyak 13 sekolah telah menunjukkan keberhasilan dalam mengembangkan akses pendidikan. Sebanyak 2 sekolah dinyatakan kurang, dan 1 sekolah dengan kategori cukup.

Selanjutnya dari MTs-SA yang diteliti, terdapat satu MTs-SA yang masih belum optimal dalam penerimaan siswa baru, yaitu MTs. Kota Malang. Menurut Kepala Madrasah, partisipasi masyarakat untuk menyekolahkan anaknya di MTs-SA masih sangat kurang. Terdapat 7 MTs yang telah menyertakan siswa mereka dalam Ujian Nasional. Hasil UN untuk 7 MTs tersebut pada TA 2008/2009 dan TA 2009/2010:

Tabel. 10 Angka Kelulusan Siswa MTs-SA pada UN

No	Nama MTs. SA	TA. 2008/2009			TA. 2009/2010		
		Jumlah			Jumlah		
		Peserta	Tdk Lulus	%	Peserta	Tdk Lulus	%
1	Darul Muhsinin, Lebak, Banten	-					
2	Miftahul Ulum, Pandeglang	-					
3	Hidayatul Athfal, Serang	50	3	6	43	0	0
4	Nurul Huda, Tangerang	33	0	0	21	0	0
5	Nurul Huda, Bekasi, Jabar	122	0	0	131	0	0
6	Nurul Falah, Garut, Jabar	-					
7	Raudatushibyan, Sukabumi	-					
8	Darul Fikri, Tasikmalaya	15	0	0	23	0	0
9	Al-Ihsan, Kebumen, Jateng	28	1	3.6	45	9	20
10	Al-Hidayah, Purwodadi	-					
11	Al-Islam, Sukoharjo, Jateng	-					
12	Nurul Huda Lamongan	-					
13	MTs.SA Kota Malang, Jatim	-					
14	Sabilul Muttaqien, Pamekasan	16	1	6.2	19	0	0
15	Roudlotul Karomah, Pasuruan	-					
16	Miftahul Ulum, Sampang	10	0	0	15	0	0

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa mayoritas siswa yang mengikuti UN pada 2 tahun ajaran tersebut dapat lulus. Sebagian besar MTs-SA mencatatkan kelulusan 100% bagi siswa yang mengikuti ujian nasional.

Kondisi lainnya yang juga harus menjadi perhatian adalah sarana pendukung pembelajaran, seperti media-media belajar, laboratorium, dan perpustakaan masih dirasakan sangat kurang. Semua MTs. SA masih belum memiliki laboratorium pembelajaran (seperti Lab. MIPA), walau dalam skala sangat kecil. Ini tentu akan menjadi penghambat dalam usaha peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah. Hal lain yang juga masih dirasakan sebagai kendala oleh masyarakat adalah mengenai masih adanya pungutan di luar biaya wajib pendidikan seperti SPP.

Terlepas dari banyaknya permasalahan yang mengiringi proses belajar siswa di MTs. SA, kehadiran program ini telah mampu memberikan layanan pendidikan dasar yang cukup baik bagi anak usia sekolah. Lokasi MTs. SA yang sesuai dengan standard program, membuat program ini menjadi pemenuhan terhadap harapan masyarakat akan pendidikan dasar 9 tahun yang mudah dan murah.

## **V. PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Keberadaan MTs. SA cukup efektif berada di tengah-tengah masyarakat yang mayoritas tingkat ekonominya rendah, sehingga masyarakat sekitar mau menyekolahkan anaknya ke MTs-SA. Secara geografis, keberadaan MTs. SA memang cukup variatif, dimana tidak semua sekolah didirikan pada pertimbangan geografis yang tepat. Namun secara sosio-kultural, keberadaannya merupakan kebutuhan penting masyarakat.
2. Pada aspek ketersediaan layanan pendidikan, manfaat terbesar yang diberikan program MTs. SA adalah akses yang lebih mudah terhadap pendidikan dasar bagi anak usia sekolah. Aspek-aspek lain yang termasuk dalam layanan pendidikan masih dirasakan kurang adalah: (a) Akses jalan ke lokasi MTs. SA yang kurang mendukung, (b) Ruang kelas yang terbatas, (c) Sarana dan prasarana pembelajaran yang kurang, seperti perpustakaan, laboratorium, dan buku pelajaran, dan (d)

Jumlah tenaga pendidik (guru) yang kurang, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas.

3. Respon masyarakat terhadap kehadiran MTs. SA sangat positif, yang ditandai dengan peningkatan jumlah siswa pada setiap tahun ajaran sejak MTs. SA didirikan. Tidak hanya itu, respon positif masyarakat ini sudah terlihat sejak awal program MTs. SA digulirkan, dalam bentuk sumbangan pikiran dan tenaga demi terwujudnya MTs. SA pada daerah masing-masing.
4. Secara umum, tata kelola yang dikembangkan oleh MTs. SA, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan sudah cukup baik, terutama pada aspek pelaksanaan program belajar mengajar. MTs. SA sudah melakukan usaha dalam meningkatkan profesionalisme guru seperti pelatihan-pelatihan guru dan peningkatan kualifikasi guru. Namun upaya peningkatan profesionalisme guru belum diimbangi dengan peningkatan kesejahteraan guru. Tata kelola dalam bidang keuangan juga cukup baik, mulai dari penggalian sumber, pengalokasian, pemanfaatan dan pertanggungjawaban keuangan yang digunakan dalam penyelenggaraan pendidikan dalam upaya mencapai tujuan pendidikan di madrasah, meskipun jumlah dana yang diterima MTs. SA masih sangat terbatas.
5. Umumnya orang tua siswa dan warga masyarakat merasa bertanggung jawab secara moral untuk mendukung MTs. SA. Kesadaran ini dapat meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam membantu pengelolaan pendidikan. Namun, partisipasi orang tua siswa dan warga masyarakat tersebut sangat terbatas kepada kemampuannya, sebab umumnya orang tua siswa dan warga masyarakat di sekitar MTs. SA tergolong berekonomi lemah.

## **B. Rekomendasi**

1. Menyerap aspirasi masyarakat yang terkait dengan peningkatan keterampilan hidup yang dibutuhkan masyarakat untuk dimasukkan menjadi program pendidikan di sekolah;

2. Melakukan penyadaran terhadap masyarakat akan pentingnya pendidikan bagi peningkatan kualitas hidup;
3. Menumbuhkan komitmen pemerintah untuk memfasilitasi terselenggaranya MSA;
4. Melakukan penggalangan potensi masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan MTs SA;
5. Mengembangkan sistem MTs SA yang implementabel, berkelanjutan dan mengarah pada pencapaian tujuan pendidikan;
6. Mengembangkan sinergi diantara *stakeholder* agar mampu berkontribusi secara optimal dalam pelaksanaan MTs SA;
7. Melakukan monitoring, supervise dan evaluasi sebagai wujud penjaminan keberlangsungan MSA.

#### SUMBER BACAAN

- Brinkerhoff, Robert O., et. all. (1983): *Program Evaluation, A Practitioner's Guide For Trainers and Educators*. Boston, Kluwer-Nijhoff Publishing.
- Departemen Pendidikan Nasional RI (2005): Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Jakarta.
- Depdiknas (2002): *Panduan Monitoring dan Evaluasi*; Buku 3. Jakarta, Depdiknas Dikdasmen Direktorat SLTP.
- Djaali, dkk (2004): *Pengukuran Dalam Bidang Pendidikan*. Jakarta, PPs UNJ.
- Fuad, Nurhattati (2008): "Madrasah SA: Sebuah Alternatif", *Edukasi*, Vol 6, Nomor 4, Oktober-Desember 2008
- Gronlund, Norman E. and Robert L. Linn (1990): *Measurment and Evaluation in Teaching*. New York, Mac Milan Publishing Company,.

- Musa, Saburi (2005): *Evaluasi Program Pembelajaran Dan Pemberdayaan Masyarakat*, Bandung: Y-Pin Indonesia.
- Pemerintah Australia dan Indonesia, *Manual Program:Program Pendidikan Dasar Australia Indonesia, 12 Desember 2008*, edisi Ketiga, Maret 2009, <http://www.bep.or.id>
- Rutman, Leonard (1984): *Evaluation Research Methodology*. New Delhi, Sege Publication India PVT. Ltd., 2 ed.
- UUD 1945, Naskah Asli dan Perubahannya. Jakarta : Pustaka Pergaulan, Cet VII, 2006.
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (2003): Jakarta, BP Cipta Jaya.
- Popham, W. James (1981): *Modern Educational Evaluation*, New Jersey: Prentice Hall Inc.